

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan mayoritas bisnis di seluruh dunia dan merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi global, baik di negara maju maupun negara berkembang. Misalnya, di Amerika Serikat, pemerintah melaporkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari setengah pekerjaan sektor swasta dan menyumbang hampir dua pertiga dari pertumbuhan pekerjaan. Sedangkan di luar AS, Ayyagari et al., (2011) menganalisis data dari 99 negara yang disurvei selama 2006-2010 dan menemukan bahwa UMKM menyumbang hampir dua pertiga dari semua peluang kerja dan menyumbang hampir 90% dalam menciptakan lapangan kerja.

Indonesia menjadi salah satu Negara berkembang yang melakukan kegiatan ekonomi UMKM. UMKM secara keseluruhan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring berganti tahun.

Tabel 1. 1. Perkembangan Data Usaha Kecil Menengah (UMKM)

| Perkembangan UMKM | Tabel Perkembangan UMKM | |
|--|-------------------------|--------------|
| | 2017 | 2018 |
| Jumlah UMKM (Unit) | 62,922,617 | 64,194,057 |
| Pertumbuhan Jumlah UMKM | 2.06% | 2.02% |
| Jumlah Tenaga Kerja UMKM (Orang) | 116,431,224 | 116,978,631 |
| Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja UMKM | 3.41% | 0.47% |
| Sumbangan PDB UMKM (Harga Berlaku) (Miliar Rupiah) | 7,820,282.60 | 8,573,895.30 |
| Pertumbuhan Sumbangan PDB UMKM | 9.92% | 9.64% |

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Unit UMKM, Tenaga Kerja UMKM serta Pertumbuhan sumbangan UMKM mengalami peningkatan dari

tahun 2017 hingga 2018. Melalui perkembangan UMKM ini diharapkan dapat menjadi pilar perekonomian nasional dan berperan sebagai penopang perekonomian nasional.

International Finance Corporation (2017) Memperkirakan sekitar 600 juta pekerjaan akan dibutuhkan pada tahun 2030 untuk menyerap tenaga kerja global yang terus bertumbuh, yang menjadikan pengembangan UMKM sebagai prioritas tinggi bagi banyak pemerintah di seluruh dunia. Di pasar negara berkembang, sebagian besar pekerjaan formal dihasilkan oleh UMKM, yang menciptakan 7 dari 10 pekerjaan. Penelitian Bank Dunia (*World Bank*) menggunakan database untuk 99 negara berkembang, dan menemukan bahwa perusahaan kecil atau UMKM memiliki kontributor penting dalam penciptaan lapangan kerja.

Namun, akses keuangan merupakan kendala utama bagi pertumbuhan UMKM, modal usaha adalah kendala yang paling banyak dikutip yang dihadapi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka di pasar negara berkembang. UMKM lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pinjaman bank dibandingkan perusahaan besar; sebaliknya, mereka mengandalkan dana internal, atau uang tunai dari teman dan keluarga, untuk memulai dan menjalankan usaha mereka pada awalnya (Kompas.com).

Untuk mengatasi permasalahan permodalan dalam UMKM, pemerintah memberikan dukungan fasilitas pembiayaan yang berasal dari perbankan. Dukungan pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui alokasi anggaran pemberian jaminan kredit dalam Program KUR, Bank memiliki peran dalam mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yaitu sebagai penyedia dana untuk kelangsungan kegiatan usaha. Selain itu Bank juga berperan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan pada UMKM agar dapat mengembangkan usahanya (Aristanto *et al.*, 2020).

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum

cukup. Realisasi penyaluran KUR sejak Januari 2021 sampai dengan 29 April 2021 telah mencapai sebesar 82,56 triliun rupiah (32,63% dari target tahun 2021 sebesar Rp253 triliun) dan diberikan kepada 2,28 juta debitur sehingga total outstanding KUR sebesar 252,92 triliun rupiah dengan tingkat *Non Performing Loan (NPL)* sebesar 0,71% (kur.ekon.go.id).

Arah kebijakan di bidang UMKM adalah meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, 4) Penguatan kelembagaan usaha, 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha (kur.ekon.go.id) .

UMKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana (kur.ekon.go.id).

Kegiatan yang bertajuk Penyaluran KUR di sektor UMKM ini diikuti oleh banyak Bank ternama yang ditunjuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk di dalamnya Bank Bukopin. Bank Bukopin sendiri telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai penyalur KUR sejak tahun 2014. Sampai dengan saat ini nilai penyaluran KUR Bank Bukopin mencapai Rp 1.8 triliun dengan total pelaku UMKM yang menerima pembiayaan sebanyak 12.144 Nasabah (kur.ekon.go.id).

Penyaluran KUR dalam kurun waktu tersebut terbilang cukup sukses, salah satunya yang Bank Bukopin salurkan pada tahun 2019. Mengacu pada laporan keuangan Perseroan, Bank Bukopin berhasil melampaui target pencapaian penyaluran KUR di tahun tersebut hingga 104% (rri.co.id).

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil judul "**Analisis Sistem dan Prosedur dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank KB Bukopin Tbk, Cabang Kelapa Gading**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank KB Bukopin Tbk, Cabang Kelapa Gading.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Kepada UMKM oleh PT Bank KB Bukopin, Cabang Kelapa Gading.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam rangka memperoleh akses perbankan, khususnya dengan Bank Bukopin. Juga sebagai masukan bagi Bank Bukopin dalam rangka memudahkan dan meningkatkan pelayanan atas penyaluran kredit kepada UMKM.
3. Kegunaan bagi dunia akademik

Penelitian ini sebagai literature tambahan dan referensi untuk para akademisi dalam penelitian yang akan mendatang.